

Universitas Sriwijaya - Palembang

Desentralisasi
(Decentralization)

Dialog Nasional Workshop dan Sosialisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
(National Dialogue Workshop and Socialization on Regional Autonomy)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

July 20 – 22, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

DESENTRALISASI

1. Definisi :

Ada beragam definisi

Rondinelli : 1983 "*Decentralization means different Things to different people*".

J. Manor: 1999 "*Numerous definitions of decentralization emerge from the literature*".

2. Sebab definisi yang beragam:

- a) Beragam aspek/hal/pihak bisa terlibat/terkait dalam suatu proses desentralisasi di beberapa negara;
- b) Masing-masing pengkaji menyoroiti desentralisasi dalam lingkup tertentu, terhadap suatu atau sejumlah negara tertentu.

3. Aspek/Hal/Pihak yang dapat terkait:

Aspek:

1. Politik
2. Fiskal
3. Administrasi
4. Ekonomi

Hal-hal:

1. Perencanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Pengelolaan/ manajemen
4. Pemantauan dan pengawasan

Pihak-pihak:

1. Pemerintah Daerah Otonom
 2. Pemerintah Daerah sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah
 3. Instansi-instansi vertikal Pemerintah Pusat
 4. Perusahaan-perusahaan pemerintah atau semi pemerintah
 5. Swasta atau Lembaga Non-Pemerintah
-

4. Klasifikasi atau Pengelompokkan:

1. Lituack & Seddon:

- a. Desentralisasi Politik;
- b. Desentralisasi Administrasi:
 - Dekonsentrasi
 - Delegasi
 - Devolusi

c. Desentralisasi fiskal

d. Desentralisasi Ekonomi/Pasar

- Privatisasi
- Deregulasi

2. Rondinelli:

a. Dekonsentrasi

b. Delegasi

c. Devolusi

d. Transfer urusan ke lembaga Non-Pemerintah

3. J. Hanor

- a. Dekonsentrasi/ Desentralisasi Administrasi
- b. Delegasi
- c. Desentralisasi Fiskal
- d. Devolusi/ Desentralisasi Demokratik
- e. Privatisasi

5. Hakekat Desentralisasi

Adanya transfer (pengalihan) tanggung jawab dan/ atau wewenang dari Pemerintah Pusat

6. Tujuan utama yang hendak dicapai :

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan yang lebih baik.

7. Alasan ditempuhnya Desentralisasi

- a. Tugas di Pemerintah Pusat bertumpuk;
- b. Birokrasi sampai Pemerintah Pusat terlalu panjang
- c. Preferensi dan kebutuhan masyarakat suatu daerah berbeda dengan daerah lainnya
- d. Pemerintah lebih mengetahui preferensi dan kebutuhan masyarakat daerahnya ketimbang Pemerintah Pusat
- e. Agar pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas/urusan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi lebih langsung dan jelas
- f. Mencegah disintegrasi yang disebabkan oleh kekecewaan masyarakat daerah terhadap kemampuan Pemerintah Pusat.
- g. Sarana inovasi dan mencegah terjadinya kegagalan massal

8. Masalahnya:

Tugas/urusan/kewenangan dan tanggung jawab mana yang mesti di desentralisasikan

9. Jawaban dari Teori Ekonomi

Tujuan pengelolaan ekonomi Nasional:

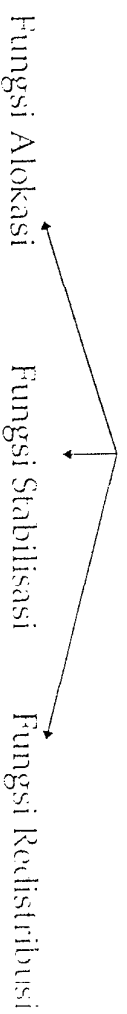
- a. Pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja
- b. Stabilitas tingkat harga
- c. Perataan Pendapatan



Sektor swasta atau pasar tidak dapat menjamin semua ini terjadi

Maka perlu aktivitas pemerintah

Fungsi Pemerintah dalam hal ini:



1. Fungsi alokasi:

Tugas pemerintah untuk mengupayakan pemanfaatan sumberdaya oleh Pemerintah itu sendiri ataupun oleh swasta secara efisien atau sejalan dengan hasrat masyarakat kesejahteraan masyarakat

2. Fungsi Stabilitas:

Tugas pemerintah untuk mengupayakan agar fluktuasi tingkat harga tidak terlalu besar

3. Fungsi Redistribusi :

Tugas pemerintah untuk mewujudkan distribusi pendapatan yang relatif merata



← Fungsi 2 dan 3 tidak didesentralisasikan sedangkan fungsi 1 sebagian desentralisasikan

Karena:

- (i) Mobilitas Penduduk
- (ii) Kewenangan di Bidang Moneter

Fungsi Alokasi

Dijalankan Via:

- (i) Regulasi dan Kebijakan
- (ii) Penyediaan barang/jasa publik secara langsung

Dilakukan Oleh

Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah

Disinilah perlunya ada pembagian tugas dan kewenangan

Teori Ekonomi menyebutnya:
Tingkat yang merupakan

- *National Public goods*
- *Provincial public goods*
- *Local Public goods*

Prinsip:
"perfect correspondence" dan
"spill - over effect"

Perlu kajian mendalam atas
macam tugas yang paling cocok
untuk ditangani oleh masing-
masing tingkat pemerintahan

10. Prinsip Pembagian Sumber Pembangunan

a. Sumber Pembiayaan Bagi Pemerintah Daerah

- (i) yang terdistribusi relatif merata di hampir semua daerah
- (ii) yang relatif tidak sulit dalam penggalannya, sehingga dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah
- (iii) yang basisnya tidak berpindah-pindah antar daerah;
- (iv) yang akan menghadirkan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat daerah

b. Bagi Pemerintah Pusat:

- (i) yang terdistribusi secara tidak merata antar daerah;
- (ii) yang relatif sulit dalam penggalannya
- (iii) yang basisnya amat mobil

11. Prasyarat Keberhasilan Upaya Desentralisasi

1. Kesadaran dan motivasi baik pada Pemerintah Pusat maupun yang menerima pelimpahan tugas dan wewenang bahwa tujuan utama desentralisasi adalah "Mempertinggi Kesejahteraan Rakyat"
2. Dalam konteks desentralisasi kepada daerah otonom, DPRD harus berjuang menegakkan informasi tentang aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya dan berjuang pula untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu.
3. Iklim, institusi dan jiwa demokratik yang murni harus tumbuh, terutama di Pemerintah Daerah dan DPRD → sudah tentu juga di tingkat Pusat.
4. Kapabilitas pengelola pemerintah dan wakil-wakil rakyat harus memadai sehingga mampu untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan, dan melaksanakan. Yang akan mempertinggi kesejahteraan masyarakat.

12. Desentralisasi Menurut UU No. 22/1999

Penyerahan wenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia :

[Ketentuan Umum]

Tanggung jawab sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan

- (i) Meningkatkan pelayanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
 - (ii) Mengembangkan kehidupan demokrasi; keadilan dan pemerataan
 - (iii) Memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- (Ketentuan penutup, Bab XVI, butir h)

Kewenangan Daerah Otonom

Seluruh bidang pemerintahan kecuali: Politik Luar Negeri Pertahanan dan Keamanan, Peradilan, Moneter, Fiskal, Agama dan bidang lainnya. (Bab IV pasal 7).

13. Perimbangan Keuangan : UU No 25/1999

1. Meningkatkan Keseimbangan Vertikal:
 - a. Sebagian dari penerimaan pemerintah pusat dari PBB, BPHTB dan SDA akan diberikan kepada Daerah dengan formula seperti tercantum pada pasal 6, Bab II, ayat 2 s/d 6 dan pasal 7 ayat 2, pasal 8 ayat 1
 - b. 25% dari penerimaan dalam negeri Pemerintah Pusat akan menjadi PAD
2. Meniadakan Kesenjangan Horizontal:

DAU akan dibagikan dengan memperhatikan:

 - a. Kebutuhan wilayah → fungsi (jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin)
 - b. Potensi Ekonomi Daerah → fungsi (potensi industri, potensi SDA, PDRB).

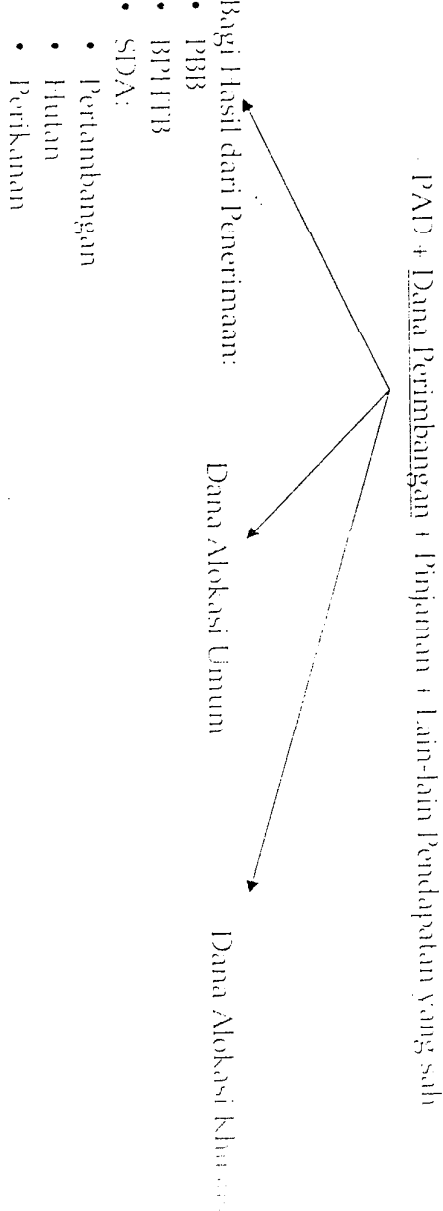
Pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia

Kewenangan \equiv pembiayaan

Sarana dan Prasarana

Sumber Daya Manusia

Pembiayaan:



Pembagian Tugas Vs Pembagian Sumber Dana

